

Daftar Pustaka

- Agostino, Giorgio D, J. Paul Dunne dan Luca Pieroni. 2016. "Government Spending, Corruption and Economic Growth." *World Development*. Vol. 84, pp. 190–205, 2016 0305-750X. Diakses pada 14 Juli 2019. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.03.011>.
- Aliabadi, Farzaneh Jalali, Bita Mashayekhi dan Graham Gal. 2019. "Budget Preparers' Perceptions and Performance-based Budgeting Implementation: The Case of Iranian Public Universities and Research Institutes." *Journal of Public Budgeting, Accounting dan Financial Management*. Vol. 31 Issue: 1, pp. 137-156. Diakses pada 28 Juni 2019. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2018-0037>.
- Amakom, Uzochukwu. 2015. "Nigeria's Government Spending on Basic Education and Healthcare in the Last Decade: What has Changed After Reforms?" *Journal of African Economies*. 127:1085–1102. Diakses pada 30 Juni 2019. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-015-1004-8>.
- Arsyad, Lincolin. 2016. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Auerbach, Alan J. dan Gale, William G. 2000. "Perspective on The Budget Surplus." *National Bureau of Economic Research*. No. 7837. Diakses pada 12 Juli 2019. <https://www.nber.org/papers/w7837>.
- Conyers dan Hills. 1994. "An Introduction to Development Planning in The Third World." Dikutip dalam Arsyad, Lincolin: *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. (Yogyakarta: BPFE, 2016).
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Universitas Gadjah Mada.
- Firdaus, M, Harmini dan Farid M.A. 2013. *Aplikasi Metode Kuantitatif untuk Manajemen Bisnis*. Bogor: IPB Press.
- Ghali, Khalifa. 2017. "Government Spending, Budget Financing, and Economic Growth: The Tunisian Experience Author." *Journal of Developing Areas*, Vol 36, No. 2. Diakses pada 12 Juli 2019. <https://www.jstor.org/stable/4192918>.
- Hartono. 2009. *SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, Jogiyanto. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- , 2018. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI.
- Kompas. 2017. Wawancara oleh Estu Suryowati. Kompas, 14 Agustus 2017. Diakses pada 16 Juli 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/14/13540681/kemendagri-susun-draf-pp-untuk-nilai-kinerja-kepala-daerah?page=all>.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Lind, Douglas A., William G. Marchal, dan Samuel A. Wathen. 2018. *Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ma, Jun, dan Yu, Li. 2012. "Why Money cannot be Spent as Budgeted? Lessons from China's Recent Budget Reforms." *Journal of Public Budgeting, Accounting dan Financial Management*. Vol. 24 Issue: 1, pp.83-113. Diakses pada 28 Juni 2019. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-24-01-2012-B005>.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Walikota Pangkalpinang. 20 Juli.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Walikota Pangkalpinang. 8 Agustus.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Walikota Pangkalpinang. 28 Juli.
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Walikota Pangkalpinang. 5 Agustus.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 15 Mei.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 22 Desember.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 25 Februari.
- Prakoso, Jalu Aji. 2017. "Hubungan DAU, DAK dan Sisa Kurang Belanja Modal terhadap Timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Daerah serta Dampaknya terhadap Indikator Ekonomi Daerah." Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada.
- Rakhman, Fuad. 2019. "Budget Implementation in a Risky Environment: Evidence from The Indonesian Public Sector." *Asian Review of Accounting*, Vol.27 Issue: 2, pp.162-176. Diakses pada 28 Juni 2019. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2018-0020>.
- Republika. 2015. Wawancara oleh Fauziah Mursid. Republika, 07 Juli 2015. Diakses pada 15 Juli 2019. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/nr2y7v/serapan-anggaran-kurang-mendagri-tiga-kali-surati-pemda>.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2012. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah
- . 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruchaiyah, Siti. "The Impact of Fiscal Decentralization on the Budget Structure of Local Governments: "SiLPA" at Regency and Municipal Governments in East Java." Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada.

- Saaty, T. L. 1980. *"The Analytical Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation."* Dikutip dalam Hartono, Jogyanto: *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Yogyakarta: BPFE, 2018)
- Saleh, Samsubar. 2004. *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Samaloisa, Christoper. 2014. "Analisis SiLPA dan Daya Serap Anggaran pada Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2012." Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada.
- Soelistyo. 2001. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Somantri, Ating dan Sambas A. Muhidin. 2011. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- TEPRA. 2019. "Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran." LKPP. Diakses pada 14 Juli 2019. <https://monev.lkpp.go.id/>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia. 28 April.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 7 Mei.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 2 Oktober.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Presiden Republik Indonesia. 5 Oktober.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 15 Oktober.